

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik kemanusiaan yang terjadi di Darfur menjadi perhatian dunia karena menyebabkan timbulnya banyak korban serta pengungsi yang harus meninggalkan tempat tinggalnya. Terjadinya konflik ini mengundang perhatian komunitas internasional khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga dibentuklah operasi gabungan *United Nations - African Union Hybrid Operation in Darfur* atau UNAMID pada 31 Juli 2007 oleh Dewan Keamanan PBB pada resolusi 1769 yang diharapkan dapat mengatasi konflik kemanusiaan tersebut. Selama masa pengimplementasian UNAMID dan penerapan intervensi kemanusiaannya, telah terjadi perubahan signifikan terhadap konflik yang terjadi. Namun, sebelum implementasi UNAMID, kondisi krisis kemanusiaan yang terjadi di Darfur menimbulkan dampak yang sangat mencemaskan karena terus menimbulkan korban baik itu secara fisik, ekonomi, dan kesehatan mental. Setidaknya, semenjak tahun 2003 sampai pada akhirnya UNAMID dibentuk, telah memakan korban sebanyak 450.000 jiwa (Garfield & Polonsky, 2010)

Komunitas internasional menganggap bahwa intervensi kemanusiaan bertujuan untuk mencegah kekejaman secara masal, hal ini berarti menggunakan berbagai cara untuk menghentikan kekerasan terhadap kemanusiaan yang juga dapat diinterpretasikan menggunakan kekuatan militer atau menyelesaikan masalah dengan ‘perang’. Tidak terdapat penjelasan hukum yang pasti untuk menjelaskan intervensi kemanusiaan, namun hal ini memiliki tujuan politik yang masih tetap sama yaitu untuk melaksanakan operasi demi membela warga sipil akan ancaman perang atau kekejaman terhadap manusia secara masal. Hasil yang ditimbulkan pun akan berbeda-beda untuk setiap aktornya, berbeda dari perang yang disebabkan oleh kepentingan diri sendiri atau negara (Paris, 2014). Pelaksanaan intervensi kemanusiaan terhadap negara yang sedang mengalami konflik internal memunculkan sebuah pemikiran bahwa penyelesaian masalah oleh pihak luar

hanya dapat dilakukan dengan memberikan bantuan esensial yang notabeneanya tidak akan menambah kerusakan yang telah terjadi.

Darfur sendiri merupakan sebuah kota dengan populasi yang terdiri dari berbagai macam etnis, kelompok pribumi dan migran Arab yang mendominasi populasi di Darfur telah hidup berdampingan sejak dulu. Sumber daya yang terbatas menjadi salah satu masalah yang menimbulkan konflik di Darfur. Kelompok pribumi yang terdiri dari Fur, Zaghawa, dan Masalit merasa telah terdiskriminasi oleh kaum pendatang Arab (Brosché, 2022). Oleh karena itu, kelompok pemberontak yang bernama *Sudan Liberation Army* dan *Justice and Equality Movement* melakukan penuntutan terhadap pemerintah Sudan yang dianggap telah gagal dalam menjaga wilayah mereka dari para pendatang. Tindakan ini seperti memunculkan sebab-akibat yang dijawab oleh pembentukan kelompok pemberontak Arab yang bernama *Janjaweed*. Sejak saat itu, kekejaman kemanusiaan dengan pertumpahan darah untuk memperebutkan wilayah dan sumber daya tidak dapat dihindarkan.

Komunitas yang ada di Darfur, khususnya tiga komunitas non-Arab yaitu Fur, Zaghawa dan Masalit, dapat dikatakan sebagai komunitas yang tertindas akibat dari Arabisasi (Burr & Collins, 2008). Perkenalan Arabisasi ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan dengan Libya pada tahun 1990 untuk mengamankan pasokan senjata dari Gaddafi. Akibat dari hal ini, pemerintahan Sudan memiliki perilaku yang bias terhadap komunitas-komunitasnya. Sejak saat itu pula, kesenjangan interkomunal terus meningkat. Konflik-konflik yang diakibatkan dari perebutan lahan, bahan pangan dan air bersih menjadi dampak dari kesenjangan tersebut. Menurut Tubiana (2012), pemerintahan Sudan menggunakan taktik *divide-and-conquer* untuk mempromosikan tribalisasi dan memperparah ketegangan antara komunitas yang ada di Darfur (Tubiana, Tanner, & Abdul-Jalil, 2012).

Selama masa pengimplementasian *United Nations - African Union Hybrid Operations in Darfur*, konflik yang terjadi antara kelompok milisia dengan pemerintahan dan juga konflik antar komunitasnya dapat diredam meskipun hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Atas dasar penurunan signifikansi

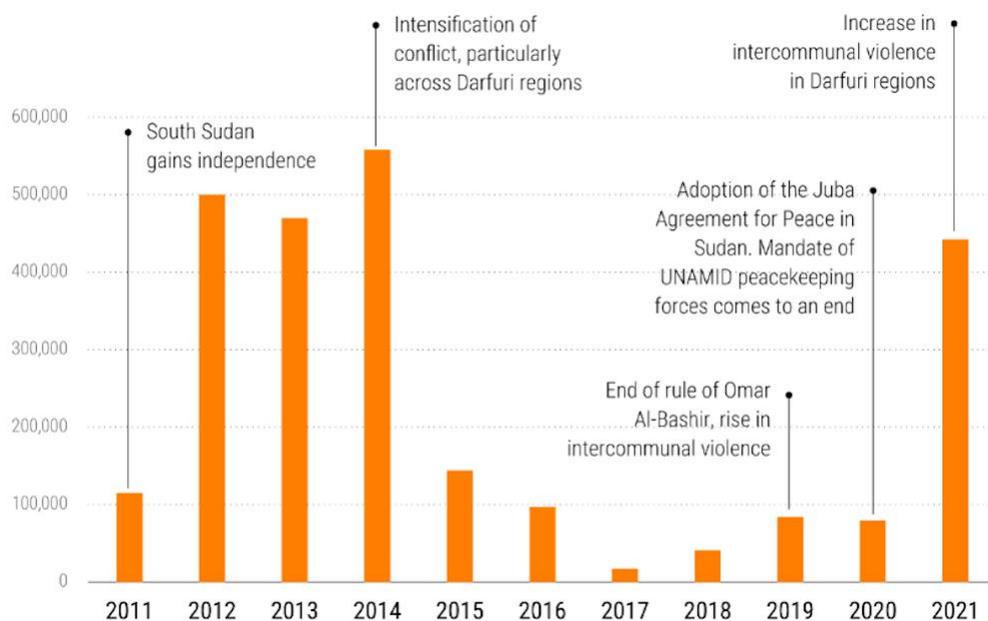
konflik tersebut, UNAMID mulai membentuk strategi keluar dari Darfur yang dimulai sejak tahun 2015 bersama dengan komite *Tripartite Mechanism*. Komite ini yang nantinya akan menjadi sebuah entitas yang memiliki pengaruh besar dalam proses keluarnya UNAMID. Setelah melakukan intervensi selama lebih dari sembilan tahun, UNAMID memiliki tugas yang mengharuskannya untuk membantu Sudan dalam proses transisi pemerintahannya menjadi lebih demokratis, di samping memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban akibat konflik yang terjadi. Hal ini ditandai dengan suara rakyat Sudan yang menginginkan penurunan kepemimpinan Omar Al-Bashir. Proses revolusi Sudan ini menjadi salah satu faktor bagi UNAMID untuk memperpanjang mandatnya sampai tahun 2020.

Penarikan diri *United Nations – African Union Hybrid Operations in Darfur* dari Sudan menimbulkan sebuah dilema yang cukup besar bagi komponen masyarakat internasional dan juga warga Sudan khususnya Darfur. Ketika UNAMID sebagai agen perdamaian menarik dirinya dari Sudan, hal tersebut akan membuka ruang vulnerabilitas bagi Sudan terhadap konflik-konflik lanjutan yang akan terjadi tanpa adanya campur tangan dari mediator. Sedangkan, posisi pada saat itu, *Government of Sudan (GOS)* atau Pemerintahan Sudan menginginkan UNAMID untuk segera angkat kaki dari Sudan karena mereka menilai campur tangan UNAMID lebih condong kepada kelompok milisia. Keadaan ini seperti menjustifikasi bahwa Pemerintahan Sudan menolak intervensi lanjutan yang akan memiliki pengaruh besar terhadap tatanan pemerintahannya. UNAMID juga memiliki porsi yang cukup besar dalam membantu proses perpolitikan yang ada di Sudan. Hal ini seperti yang tertera pada mandat UNAMID yang selaras dengan proses intervensi kemanusiaannya. Mandat-mandat tersebut memiliki inti sebagai berikut:

- Kontribusi terhadap kondisi keamanan untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan
- Melindungi warga sipil yang berada di bawah ancaman
- Membantu pelaksanaan *Darfur Peace Agreement*
- Membantu proses perpolitikan Sudan, termasuk mendukung mediasi Uni Afrika/Perserikatan Bangsa-Bangsa

- Berkontribusi terhadap lingkungan yang aman untuk rekonstruksi dan pembangunan ekonomi
- Berkontribusi untuk mempromosikan Hak Asasi Manusia
- Membantu mempromosikan *rule of law* atau supremasi hukum, termasuk bantuan institusi, dan
- Pengawasan terhadap perbatasan Sudan/Chad/Republik Afrika

Gambar 1.1 Data Jumlah *Internally Displaced Persons* di Sudan Dari Tahun 2011-2021



Sumber: (International Displacement Monitoring Centre, 2022)

Seiring dengan berjalannya tahap proses penarikan *United Nations – African Union Hybrid Operations in Darfur*, telah terjadi peningkatan konflik interkomunal yang diawali pada masa berakhirnya pemerintahan Omar Al-Bashir pada tahun 2019. Lalu pada tahun 2020, lebih tepatnya pada 31 Desember, UNAMID menyatakan bahwa mandatnya telah selesai dan mulai melanjutkan penarikan entitasnya secara berkala. Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa peningkatan yang terjadi pada aspek *Internally Displaced Persons* (IDPs) atau

pengungsi internal mengalami lonjakan yang drastis pada tahun 2021 tepat setelah satu tahun UNAMID menyelesaikan mandatnya dan memutuskan untuk keluar dari Sudan. Hal inilah yang menjadi salah satu kunci isu permasalahan yang muncul dari dilema yang terjadi di antara pihak-pihak terkait.

Kerap kali konflik yang terjadi pada suatu negara menghasilkan konflik lanjutan akibat dari keadaan yang tidak stabil pada negara tersebut. Hal ini dapat terlihat dari guncangan politik seperti pergeseran pemerintahan dan juga tidak stabilnya sektor ekonomi yang akhirnya akan merembet kepada kehidupan masyarakat sehari-hari. Berkaitan dengan selesainya mandat dari misi penjaga perdamaian, timbul pertanyaan mengenai keadaan sebuah negara setelah misi penjaga perdamaian tersebut selesai. Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Di Salvatore dan Ruggeri (2020) tentang kekuatan warisan misi penjaga perdamaian setelah mereka menyelesaikan mandatnya untuk menghindari kemungkinan kekacauan terkait dengan penarikan UN PKOs. Dalam penelitiannya, mereka menarik kesimpulan berdasarkan fokus perkembangan PDB, tingkatan demokrasi, otoritas negara, dan kondisi penduduk perempuan bahwa penelitiannya menggambarkan tren positif atas penurunan angka kematian bayi dan perbaikan kelembagaan yang tampak bertahan, meskipun tren pemulihan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan PDB masih belum dapat dipastikan karena batas ketidakpastian yang cukup besar (Salvatore & Ruggeri, 2020).

Terkait dengan pembahasan mengenai peningkatan konflik interkomunal di Darfur serta konsep resolusi konflik yang diterapkan, sejumlah literatur dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir konflik lanjutan dan juga keterkaitannya dengan program dari misi penjaga perdamaian. Kajian pertama yang menjadi tumpuan peneliti adalah penelitian dari Andrea Ruggeri, Han Dorussen, and Theodora-Ismene Gizelis (2016) yang memiliki judul *Winning the Peace Locally: UN Peacekeeping and Local Conflict* yang menggunakan informasi terpilah secara spasial tentang lokasi konflik serta pengerahan pasukan penjaga perdamaian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini termasuk misi besar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dari negara seperti Angola, Burundi, Republik Afrika Tengah, Kongo, Pantai Gading, Liberia, Sierra Leone, dan Sudan. Berdasarkan penemuan dalam penelitian ini,

terdapat bukti bahwa penjaga perdamaian juga mengurangi konfrontasi kekerasan antara pihak yang mengalami konflik. Hal ini dapat terlihat dari keadaan selama kekosongan kekuasaan dalam konflik yang membuat penjaga perdamaian memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian secara lokal.

Selain itu, penemuan dari penelitian ini yang memperkuat argumen bahwa penjagaan perdamaian dapat mengurangi atau mencegah konflik di wilayah tertentu dapat terlihat dari pentingnya perhitungan kemungkinan penugasan nonacak dari perlakuan penempatan subnasional. Penanganan konflik secara lokal oleh PBB juga sesuai dengan penemuan penelitian ini. Meskipun tidak terlalu konklusif tapi terbukti bahwa kehadiran penjaga perdamaian PBB dapat mengurangi kemungkinan berlanjutnya konflik lokal selama satu tahun ke depan. Selain itu, faktor berhasilnya kemungkinan pencegahan konflik dapat dikatakan akan lebih kuat jika jumlah penjaga perdamaian dikerahkan dalam jumlah yang lebih besar.

Dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai kekurangan dari penjagaan perdamaian yang selaras dengan penelitian menggunakan analisis spasial dari lokasi konflik. Hal ini berkaitan dengan jumlah wilayah yang dapat dikendalikan oleh penjaga perdamaian yang dinilai terbatas. Berdasarkan konklusi ini dapat dikatakan bahwa kapasitas operasi penjagaan perdamaian sangat memiliki pengaruh yang kuat dalam mengatasi konflik secara lokal. Oportunitas konflik lokal juga tidak dapat ditebak secara pasti namun, penjaga perdamaian bersedia dan mampu untuk menanggapi konflik lokal kapan pun. Hal ini juga memiliki korelasi terhadap pengerahan pasukan penjaga perdamaian di wilayah tertentu yang dapat mengimbangi kurangnya kendali otoritas pusat, dengan kata lain saat terjadi kekosongan kekuasaan. Temuan secara konklusif dari penelitian ini menunjukkan bahwa alih-alih “memenangkan” perdamaian secara lokal, penjagaan perdamaian dapat memulihkan perdamaian secara lokal dengan penegakan dan jaminan menjadi dua mekanisme resolusi konflik utama (Ruggeri, Dorussen, & Gizelis, 2016).

Selanjutnya terdapat penelitian mengenai proses transisi *United Nations – African Union Hybrid Operations in Darfur* menjadi *United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan* yang dilakukan oleh Daniel Forti. Penelitian ini berkaitan dengan meningkatnya konflik interkomunal yang terjadi di

Darfur setelah UNAMID menyelesaikan mandatnya dan memutuskan untuk keluar dari Sudan. Forti berusaha menjelaskan bagaimana proses transisi UNAMID yang dimulai sejak tahun 2014 yang sejalan dengan transisi politik Sudan menjadi lebih demokratis. Revolusi yang dialami oleh Sudan sendiri menjadi salah satu faktor yang membentuk bagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa melibatkan dirinya dengan Sudan sebagai bentuk dari proses transisi ini. Transisi ini juga dinilai menjadi salah satu rekonfigurasi yang sangat kompleks dalam organisasi ini, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan sudut pandang dari pihak-pihak yang terlibat (Forti, *Walking a Tightrope: The Transition from UNAMID to UNITAMS in Sudan*, 2021). Perbedaan ini yang menyebabkan Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki kesulitan dalam melakukan sebuah tindakan yang diprioritaskan dalam melindungi warga negara Sudan.

Selain transisi yang dilakukan oleh UNAMID, misi penjagaan perdamaian tersebut juga mengalami permasalahan yang dinilai menjadi salah satu misi perdamaian paling kompleks yang pernah dihadapi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini menjadi pertimbangan penelitian yang dilakukan oleh Adam Day mengenai strategi politik yang digunakan UNAMID dalam melakukan intervensi kemanusiaan. Penelitian ini memiliki fokus dalam menganalisis kerangka politik yang berjalan di Darfur. Munculnya rumusan permasalahan dalam kasus ini diawali dengan pertanyaan bagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UNAMID dapat mengembangkan dan membuat keputusan atas strategi yang digerakkan berdasarkan politik yang tercantum dalam elemen kunci dari misi perdamaian. Pada awalnya, proses pembentukan mandat yang didorong oleh aktivitas politik ini dinilai sebagai pertimbangan sekunder dengan melihat bagaimana pemerintahan Sudan yang skeptis terhadap campur tangan komunitas internasional khususnya PBB. Pembentukan operasi gabungan antara *UN* dan *African Union* sendiri memiliki latar belakang dengan tujuan untuk meredakan kekhawatiran atas negara-negara yang memilih untuk tidak memberikan suara dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ingin pasukan penjaga perdamaian di Darfur, negara-negara itu adalah Tiongkok, Rusia, dan Qatar (Day, 2020).

Implementasi misi penjagaan perdamaian seperti UNAMID merupakan salah satu upaya dalam meredam negara yang sedang mengalami konflik

kemanusiaan, namun operasi tersebut kerap menimbulkan kecemasan di antara komunitas internasional mengenai keefektifitasannya. Penelitian berikutnya membahas tentang masa depan operasi misi penjagaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dianalisis menggunakan teori kompleksitas yang ditulis oleh Cedric de Coning. Penelitian ini memiliki fokus bagaimana misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dapat berkembang atau mengalami evolusi ditinjau dari jangka waktu pendek, menengah dan panjang. Dalam melakukan analisis ini, Coning menggunakan teori kompleksitas yang menyediakan kerangka teoritis untuk menganalisis bagaimana sistem yang kompleks seperti masyarakat, organisasi dan institusi internasional dapat berfungsi di bawah tekanan dan juga bagaimana mereka bereaksi terhadap turbulensi dan gangguan di lingkungan mereka (Coning, 2021). Selain itu, fokus pada penelitian ini tertuju pada bagaimana misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang cenderung beradaptasi dengan kemunduran dan guncangan seperti Pandemi COVID-19, resesi ekonomi dan perubahan dalam hubungan kekuatan geopolitik. Dalam era pasca Perang Dingin, misi penjagaan perdamaian telah mengalami evolusi dari alat manajemen konflik yang terbatas menjadi instrumen manajemen konflik yang jauh lebih komprehensif.

Melihat keadaan yang terjadi saat transisi keluarnya UNAMID dari Sudan, menimbulkan sebuah dilema di antara entitas yang terkait pada konflik kemanusiaan yang terjadi di Sudan. Hal ini akan berkaitan dengan bagaimana sebuah negara pasca-konflik akan membangun kembali negaranya dengan bantuan aktor internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penelitian terkait yang peneliti pilih adalah *United Nations Peacekeeping Locally: Enabling Conflict Resolution, Reducing Communal Violence* yang ditulis oleh Hannah M. Smidt. Penelitian ini menggunakan aktivitas dialog antargrup lokal yang dapat membantu meredakan konflik komunal. Pertemuan antar komunitas ini menyediakan sebuah kesempatan bagi setiap pemimpin komunitas lokal untuk bertemu dan melakukan diskusi tentang isu konflik lokal (Smidt, 2019). Selain itu, untuk mengurangi konflik interkomunal, Smidt berargumen bahwa campur tangan atau intervensi dari *United Nations Peacekeeping Operations* (UN PKOs) atau operasi penjagaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat meredakan konflik interkomunal secara signifikan.

Dari beberapa literatur terdahulu mengenai kaitan penjagaan perdamaian dengan konflik yang terjadi secara lokal setelah operasi misi penjagaan perdamaian dilakukan, terlihat masih terdapat celah yang membuat konflik interkomunal meningkat di Sudan. Penelitian ini akan memiliki fokus untuk melakukan analisis terhadap resolusi konflik yang cocok untuk mencegah maupun mengurangi intensitas konflik dengan fokus penelitian mengenai keterlibatan masyarakat lokal sebagai aktor kunci dalam membendung konflik interkomunal. Oleh karena itu, peneliti mengambil topik yang memiliki judul “Peningkatan Konflik Interkomunal di Darfur Setelah Operasi Misi Perdamaian UNAMID Periode 2020-2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, penarikan *United Nations – African Union Hybrid Operations in Darfur* dari Sudan memiliki kompleksitasnya sendiri yang memunculkan sebuah dilema di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Dilema ini muncul atas dasar keadaan di lapangan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah konflik interkomunal setelah terjadi transisi di tubuh pemerintahan Sudan, perbedaan keinginan di antara Pemerintahan Sudan, warga Sudan khususnya Darfur dan pihak komunitas internasional dan berjalannya proses strategi keluarnya UNAMID dari Sudan. Peningkatan konflik interkomunal yang merembet kepada meningkatnya jumlah *Internally Displaced Persons* ini menjadi salah satu kunci permasalahan yang harus dihadapi UNITAMS sebagai bagian dari langkah lanjutan dan memastikan perdamaian pasca intervensi kemanusiaan. Dari penjelasan tersebut, peneliti dapat menarik sebuah rumusan masalah yaitu: **“Mengapa Terjadi Peningkatan Konflik Interkomunal Secara Signifikan Pada Periode UNITAMS Pasca Misi UNAMID Tahun 2020?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peningkatan konflik yang terjadi akibat transisi yang dialami Sudan yang berkaitan dengan penarikan *United Nations – African Union Hybrid Operations in Darfur* dari Sudan. Penarikan UNAMID dari Sudan ini menggambarkan sebuah permasalahan baru yang muncul

terhadap operasi kemanusiaan dalam proses transisi dan penyelesaian mandatnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peningkatan konflik yang terjadi akibat dari transisi keluarnya UNAMID dari Sudan;
2. Untuk mengidentifikasi permasalahan baru yang muncul ketika mandat UNAMID telah selesai;
3. Untuk menggambarkan situasi transisi pembinaan perdamaian yang dilakukan oleh UNITAMS.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis, penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang telah ada dan peneliti berharap dengan dibuatnya penelitian ini dapat mengisi celah yang ada dalam informasi dunia akademis terhadap permasalahan baru yang muncul akibat berakhirnya sebuah misi perdamaian pada keadaan pasca intervensi.

2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memberikan sudut pandang lain dalam pemecahan masalah mengenai penanganan peningkatan konflik yang terjadi setelah terjadinya intervensi kemanusiaan dengan melihat tindakan yang telah terjadi sebelumnya, mengingat masih banyak perdebatan mengenai bagaimana proses penarikan misi perdamaian dan pencegahan terhadap konflik lanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami alur pemikiran dalam penelitian ini, penulisan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu BAB dan sub-BAB berdasarkan sistematika penulisan yang dibagi menjadi lima bab. Oleh karena itu, sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB ini menunjukkan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini, terdapat dua sub-bab yang terbagi antara konsep dan teori yang digunakan untuk melakukan penelitian. Konsep dan teori penelitian berperan untuk menuntun jalannya penelitian agar dapat memecahkan permasalahan dan pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu, dalam BAB ini juga terdapat kerangka pemikiran yang akan membantu peneliti merangkai kata-kata dan menyusun analisis atas permasalahan yang diangkat.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB ini memuat metode yang digunakan dalam penelitian agar penelitian ini dapat dilakukan secara teratur dan memudahkan pelaksanaannya. Dalam BAB ini akan terdapat beberapa sub-BAB yaitu objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data yang diperoleh, teknik analisis data, dan tabel rencana waktu penelitian.

BAB IV PENINGKATAN KONFLIK INTERKOMUNAL SETELAH MISI PERDAMAIAN UNAMID 2017-2021

BAB ini memiliki muatan tentang gambaran dari peningkatan konflik interkomunal yang terjadi di Darfur dalam fase terakhir dari misi perdamaian UNAMID, serta gambaran bagaimana keadaan negara Sudan yang rentan terhadap permasalahan-permasalahan baru dalam periode ini. Pada BAB ini juga dijelaskan mengenai hubungan antara berakhirnya misi penjagaan perdamaian UNAMID yang membuat keadaan negara Sudan menjadi rentan pada saat masa pemerintahan transisi yang mengeskalasi terjadinya konflik interkomunal.

BAB V PENERAPAN PEMBINAAN PERDAMAIAN DAN RESOLUSI KONFLIK TERHADAP MENINGKATNYA KONFLIK INTERKOMUNAL DI DARFUR

BAB ini memuat penjelasan data yang telah ditemukan dan analisisnya terhadap masalah yang diangkat oleh peneliti, yaitu mengenai penerapan pembinaan perdamaian dan resolusi konflik terhadap peningkatan konflik interkomunal di Darfur. Upaya pembinaan perdamaian dan penerapan resolusi konflik yang diterapkan oleh UNITAMS sebagai pengganti dari UNAMID memiliki kompleksitasnya tersendiri. Peneliti berusaha untuk memperlihatkan pengaruh yang cukup signifikan dalam kinerja UNITAMS dalam keterlibatan dengan masyarakat yang ada di Sudan. pada BAB ini peneliti juga menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pemerintahan Sudan dalam menangani konflik interkomunal yang terjadi.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang akan berguna bagi penelitian-penelitian mendatang.